

BOSSMAN

Kapolres Jember Bersama Forkompinda Gelar Rapat Koordinasi Tentang Evaluasi Dan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Siswandi - JEMBER.BOSSMAN.CO.ID

Jan 11, 2023 - 19:10



JEMBER - Pada hari ini Bupati Jember H Hendy Siswanto bersama Forkompinda Plus Melaksanakan Meeting Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rapat kali ini dikemas dengan suasana santai namun tetap serius dalam kajian dan evaluasi penanganan pengendalian inflasi di Kabupaten Jember.

Turut hadir pula dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Jember H Hendy Siswanto adalah Wabup Gus Firjoun, Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, Dandim 0824 Letkol Inf Batara C Pangaribuan, Kajari I N Sucitrawan, Waka DPRD, OPD Kab. Jember, PJ Sekda, KA PW BI, KA BPS, KA Cab.Perum Bulog Kabupaten Jember

Rapat kordinasi dan evaluasi ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan inflasi baik yang diakibatkan dari dalam maupun luar daerah Jember. Rapat ini digelar sesaat setelah kegiatan olahraga bersama bertempat di gedung olahraga United Kecamatan Kaliwates Jember. Rabu (11/01/2023)

Saat melakukan sumbang saran dan pendapat Kapolres Jember menyampaikan, "Dari sekarang kita perlu adanya data berkaitan dengan lahan pertanian yang ada kemudian kita harus bisa mempengaruhi dan memberi informasi kepada petani kebutuhan kita. Sehingga pada saat musim tanam para petani tidak menanam satu jenis tanaman secara bersamaan, yang nantinya saat panen akan mempengaruhi harga tanaman hasil panen menjadi kurang bagus".

"Sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk bisa mengatur semuanya dan kalau itu bisa dilakukan Insyaallah untuk mengendalikan inflasi dan kemudian menstabilkan harga akan lebih lancar. Kemudian berkaitan dengan masalah alur distribusi barang ini saya juga mencermati kalau masalah salah satu sumber penyebab kenaikan, karena mata rantai dari produsen sampai ke konsumen terlalu banyak", jelas Kapolres.

Dalam wawancaranya Bupati Jember H Hendy Siswanto mengatakan, "Salah satu langkah kepada para petani di sini dengan diberikan edukasi oleh Pemkab untuk memberikan kebijakan pada zona-zona cara dan pola tanam yang kita atur sedemikian dan harus bisa diikuti oleh para petani, sehingga nantinya tidak sampai terjadi kekosongan barang, ada jarak antara panen dengan stok yang ada dan tentunya kebijakan untuk memetakan kembali" jelasnya. (AR)